

ABSTRACT

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PERENCANAAN PENGANGGARAN, POLITIK PENGAGGARAN, DAN
INFORMASI PENDUKUNG DENGAN TRANSPARASI PUBLIK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP SINKRONISASI
DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN KUA-PPAS
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lingga)**

By:

Lidya Elfrina

Dra. Vince Ratnawati, Msi, Ak, BKP, CA

Meilda Wiguna, SE, M.Sc

Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru Indonesia

e-mail : lidya_elfrina@yahoo.com'

This study aims to determine the effect of the capacity of human resources, budgeting, planning, budgeting politics, and supporting information to the public as a moderating variable transparency to sync documents the local budget (budget) with the Public Policy Budget document (KUA) preliminary budget ceiling (PPAS). The study population was a board member and officer / employee involved in the preparation of the Work Plan and Budget (RKA) Regional Working Units (on education) totaled 23 on education. The sampling technique using purposive sampling. Pengumpulan methods of data is the questionnaire. Analysis using multiple regression t test.

The results of this study it is concluded that in partial capacity of human resources, budgeting, planning, budgeting politics, and supporting information berpengaruh significantly to the synchronization of the budget document by document KUA-PPAS. Test results indicate that the interaction of the Public Transparency can not moderate the relationship between human resource capacity, political budgeting, and supporting information to the budget document synchronization with KUA-PPAS documents, while the test results public transparency interactions may moderate the relationship between budgeting planning to synchronize with the budget document KUA-PPAS documents.

Keywords: *budget, KUA-PPAS, Human Resource Capacity Planning Budgeting, Politics Budgeting, Information Supporters, Transparency Publik*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelola dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005:61). Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2006, penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Mekanisme penganggaran melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari tingkat pemahaman terhadap anggaran maupun dari kepentingan terhadap anggaran. Perbedaan ini diyakini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan dalam proses penyusunan anggaran yaitu antara dokumen APBD dengan dokumen

KUAPPAS. Ketidaksinkronan antara APBD dengan dokumen

KUA-PPAS umum terjadi hampir disetiap pemerintah daerah.

Bagaimana keputusan pengalokasian anggaran dibuat? Secara normatif ada tahapan-tahapan yang diikuti, yakni (1) penyusunan rencana kerja atau RKPD (2) penyusunan kebijakan anggaran atau KUA; (3) penyusunan prioritas dan plafon/pagu atau PPAS (4) penentuan secara rinci penggunaan sumberdaya ke dalam rincian objek belanja atau RKPA-SKPD dan (5) penetapan ke dalam bentuk Perda APBD. Khusus tahap 2, 3, dan 5 melibatkan lembaga legislatif (DPRD) sehingga lebih kompleks dan sarat dengan “kepentingan politik”.

Menurut Amirudin (2009) peran utama legislatif dalam proses politik penyusunan APBD terkait jelas saat pembahasan KUA-PPAS serta dalam penetapan perda APBD. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui proses politik dengan acuan KUA-dan PPAS sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu pemerintah daerah sehingga keputusan dalam pengalokasian anggaran kompleks dengan politik penganggaran yang diyakini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan dalam pengalokasian anggaran yaitu antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Informasi merupakan keluaran (output) dari suatu proses pengelolaan data, dimana output ini biasanya sudah tersusun dengan baik dan mempunyai arti bagi yang menerimanya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk

mengambil keputusan oleh manajemen (Baridwan,2000)

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan memerlukan dukungan informasi. Tanpa dukungan informasi, dokumen perencanaan organisasi tidak dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ketidaksinkronan juga dipengaruhi oleh acuan ketentuan peraturan perundangan karena acuan tersebut sebagai pembentuk faktor perencanaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap ketidaksinkronan dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2012 terdapat permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Lingga sepanjang Tahun 2012 antara lain pemahaman dan pembahasan APBK kurang optimal yang dipengaruhi belum berjalan efektif dan efisien pengesahan APBK oleh DPRK Lingga serta masih terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis yang muncul dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBK Lingga. Hal ini tidak dapat diakomodir secara langsung dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lingga serta belum optimalnya tingkat efisiensi dan efektifitas pengeluaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Disisi lain keterbukaan atau informasi yang didapat oleh publik dalam perencanaan APBD hanya pada awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana

pembangunan (MUSRENBANG) pada berbagai tingkat. Pada tahap pelaksanaan pengolahan APBD dan tahap akhir pengolahan APBD informasi dan keterlibatan publik terputus dan tidak dipublikasikan secara terbuka, artinya publik hanya dilibatkan pada saat musyawarah rencana awal APBD dimana pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Namun pada pelaksanaan dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas tidak sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Penganggaran, Politik Penganggaran, dan Informasi Pendukung dengan Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderating Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS Pada Pemerintah Kabupaten Lingga”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan diajukan adalah:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lingga ?
2. Apakah perencanaan penganggaran berpengaruh terhadap

sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lingga?

3. Apakah politik penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lingga?
4. Apakah informasi pendukung berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lingga?
5. Apakah transparansi publik sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lingga?
6. Apakah transparansi publik sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan antara perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lingga?
7. Apakah transparansi publik sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan antara politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lingga?
8. Apakah transparansi publik sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan antara informasi pendukung terhadap sinkronisasi

dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk membuktikan adanya pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
2. Untuk membuktikan adanya pengaruh perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
3. Untuk membuktikan adanya pengaruh politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
4. Untuk membuktikan adanya pengaruh informasi pendukung terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
5. Untuk membuktikan adanya pengaruh transparansi publik sebagai variabel moderating yang mempengaruhi hubungan antar variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
6. Untuk membuktikan adanya pengaruh transparansi publik sebagai variabel moderating yang mempengaruhi hubungan antara variabel perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

7. Untuk membuktikan adanya pengaruh transparansi publik sebagai variabel moderating yang mempengaruhi hubungan antar variabel politik anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
8. Untuk membuktikan adanya pengaruh transparansi publik sebagai variabel moderating yang mempengaruhi hubungan antar variabel informasi pendukung terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anggota dewan dan pejabat/ pegawai yang terlibat dalam penyusunan RKA-SKPD di Kabupaten Lingga yang berjumlah 23 SKPD. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu Dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang di nilai dengan mewakili keseluruhan responden penelitian (Sugiyono, 2009: 122).

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan dari pihak ketiga dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang terpilih di Satuan Kerja Perangkat Daerah Indragiri Hulu.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Kuesioner adalah suatu aktivitas pengumpulan

data dengan menyebarkan angket berupa suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden terpilih untuk diisi dengan alternatif dengan pertanyaan yang telah disediakan. Kuesioner akan di kirimkan langsung oleh peneliti kepada masing-masing responden, dan responden yang terpilih berjumlah 80 responden.

2.6 Analisis Data

a. Metode Regresi Linear Berganda

Adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih dari variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah hubungan antara variabel independen atau dependen berhubungan positif atau negatif.

Dengan persamaan :

$$Y = + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_1Z + b_6X_2Z + b_7X_3Z + b_8X_4Z + b_9X_5Z + e$$

Keterangan :

Y = Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA PPAS

X1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X2 = Perencanaan Penganggaran

X3 = Politik Penganggaran

X4 = Informasi Pendukung

Z = Transparansi Publik

= Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error

2.7 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran. dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 5%, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Pada penelitian ini untuk uji validitas menggunakan *Analisis Bivariate Person* (Joko, 2010:40).

2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Cronbach's Alpha* karena metode ini cocok digunakan pada skor berbentuk skala (missal 1-5) atau skor rentang (missal 0-50), (Joko, 2010:46).

2.8 Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan menghasilkan emitor tidak bias yang baik jika memenuhi asumsi klasik yaitu bebas dari *Multikolinearitas*, *Heterokedastist as*, *Autokorelasi* dan memenuhi asumsi Normalitas .

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, antara lain Uji chi-kuadrat, Uji Lilliefors dan Uji Kolmogorov-Smirvon. Jika Pvalue (sig) >0.05 maka H_0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan data diambil dari populasi yang berdistribusi normal (Joko,

2010:52).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Sebagai contoh diambil kasus regresi X_1, X_2, X_3 dan X_4 terhadap Y . Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan koefisien korelasi antar variable bebas (Joko, 2010:56).

3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian error (e_i) tidak konstan untuk beberapa nilai x . Pendeteksian konstan tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya). Apabila garis yang membatasi sebaran titik-titik relatif paralel maka varian dikatakan konstan (Joko, 60:2010).

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi dalam regresi apabila dua eror e_{t-1} dan e_t tidak independen. Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variabel dilakukan dalam interval waktu tertentu. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan diagram antara grafik e_{t-1} dan e_t sangat sulit. Autokorelasi tidak terjadi apabila nilai $d=2$. Autokorelasi positif terjadi jika d mendekati 0, sedangkan autokorelasi negative terjadi bila nilai d mendekati 4 (Joko, 2010:62).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengembalian Kuesioner dan Demografi Responden
3.1.1 Pengembalian Kuesioner

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu secara langsung. Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 dan kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 80. Dari seluruh kuesioner yang disebarakan oleh peneliti, jumlah yang kembali berjumlah 64 (80%) kuesioner dan jumlah kuesioner yang tidak mendapat respon sebesar 16 kuesioner (20%).

Tabel IV.1. Sampel Dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Total
Kuesioner yang dikirim	80
Kuesioner yang tidak mendapat respon	16
Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	64

Sumber : Data Olahan

3.1.2 Demografi Responden

Dari hasil pengumpulan sampel dapat dijelaskan bahwa responden yang berumur 21-30 tahun berjumlah 4 responden atau 6,25%, 31-40 tahun berjumlah 21 responden atau 32,81 %, 41-50 tahun berjumlah 30 responden atau 46,88% dan >50 tahun berjumlah 9 responden atau 14,06%. Responden berjenis kelamin laki-laki 48 orang atau 75% dan yang berjenis kelamin perempuan ada 16

orang atau 25 %. Responden pada eselon II berjumlah 7 orang atau 10,94%, eselon III berjumlah 41 orang atau 64,06 %, eselon IV berjumlah 16 orang atau 25%. Selanjutnya responden yang tingkat pendidikan S2 berjumlah 4 orang atau 6,25%, S1 berjumlah 53 orang atau 82,81%, D3 berjumlah 5 orang atau 7,81%, dan SLTA berjumlah 2 orang atau 3,13%.

3.2 Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2005) di dalam (Permadani, 2013). Statistik penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.3

Tabel IV.2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Sinkronisasi	14,37 50	1,83874	64
Kapasitas Sumber Daya Manusia	36,51 56	3,43646	64
Perencanaan Penganggaran	35,78 13	3,03665	64
Politik Penganggaran	44,51 56	4,09410	64
Informasi Pendukung	17,68 75	1,93444	64

Dari hasil statistik deskriptif dapat terlihat bahwa sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yang merupakan variabel dependen yang mempunyai rata-rata jawaban responden adalah 14,3750 dengan memperoleh standar deviasi 1,83874. Sedangkan nilai

rata-rata jawaban untuk kapasitas sumber daya manusia adalah sebesar 36,5156 dengan memperoleh standar deviasi sebesar 3,43646. Perencanaan penganggaran mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 35,7813 dan memperoleh standar deviasi 3,03665. Politik penganggaran mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 44,5156 dan memperoleh standar deviasi 4,09410. Informasi pendukung mempunyai nilai rata-rata jawaban responden 17,6875 dan memperoleh standar deviasi 1,93444. Dilihat dari standar deviasi masing-masing variabel maka variable politik penganggaran memiliki standar deviasi tertinggi dibandingkan dengan variabel lainnya.

3.3 Pengujian Kualitas Data

3.3.1 Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan. Dalam penelitian ini pengujian validitas menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Korelasi Produk Momen Pearson) yaitu analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 44 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pernyataan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5% $df = n-2$ (64-2)= 62 $r_{tabel} = 0,2461$.

3.3.2 Uji Reliabilitas Data

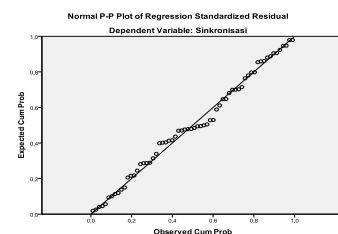
Variabel ini akan dikatakan valid jika *Cronbach Alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,6 dan nilai *Cronbach Alpha* minimal 0,5. Berikut adalah tabel hasil dari uji reliabilitas dari hasil prngolahan data spss versi 17.00.

Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen Kapasitas SDM, Perencanaan Penganggaran, Politik Penganggaran, Informasi Pendukung, Transparansi Publik, dan Sinkronisasi yang menunjukkan cronbach alpha antara lain 0,731, 0,743, 0,729, 0,712, 0,709, 0,718. Dari semua nilai ke enam variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien cronbach alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah *reliable*.

3.4 Uji Asumsi Klasik

3.4.1 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jawaban responden terdistribusi normal. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal grafik *P-P Regression Standardized Residuals*.



Dari grafik hasil penelitian ini disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji T dan Uji R^2 dapat dilakukan dalam

penelitian ini untuk menguji hipotesis.

3.4.2 Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau *VIF* < 10. Jika *VIF* > 10 maka di anggap terjadi multikolinearitas dengan variabel lainnya, sebaliknya jika diperoleh *VIF* < 10 maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas antar satu variabel independel yang satu dengan variabel yang lainnya (Ghozali, 2005) di dalam (Permadani, 2013).

Tabel IV.4. : Nilai *Tolerance* dan

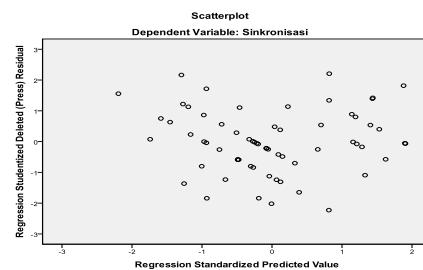
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kapasitas SDM	0,901	1,10	Tidak terdapat masalah multikolinearitas
Perencanaan Penganggaran	0,885	1,130	
Politik Penganggaran	0,771	1,298	
Informasi Pendukung	0,698	1,433	

Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *VIF* < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* < 0,10. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

3.4.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian error (*ei*) tidak konstan untuk beberapa nilai *x*. Pendeteksian konstan tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, hasil dari penelitian menunjukkan gambar hasil uji Heterokedastisitas.



Dari gambar grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwatidakterjadi Heterokedastisitas.

3.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi terjadi dalam regresi apabila dua eror e_{t-1} dan e_t tidak independen. Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variabel dilakukan dalam interval waktu tertentu.

statistik *Durbin-Watson* sebagai hasil output dari SPSS version 17.0 sebesar 1,713. Hal initelah membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi yaitu berkisar antara -2 sampai dengan +2.

3.5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode *enter* dengan bantuan program atau software SPSS versi 17.0, dimana

semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, menggunakan model analisis regresi berganda yaitu menggunakan variable kapasitas sumber daya manusia, perencanaan penganggaran, politik penganggaran, informasi pendukung, transparansi publik, dan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, sehingga didapatkan persamaan:

$$(1) \quad Y = + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$(2) \quad Y = + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_1Z + b_6X_2Z + b_7X_3Z + b_8X_4Z + b_9X_5Z + e$$

3.6 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

H₁ : Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu $3,683 > 1,6690$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

H₂: Perencanaan Penganggaran Berpengaruh Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu $2,290 > 1,6690$ dengan nilai signifikansi sebesar

0,026 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

H₃ : Politik Penganggaran Berpengaruh Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu $2,500 > 1,6690$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

H₄ : Informasi Pendukung Berpengaruh Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu $3,605 > 1,6690$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

H₅ : Transparansi Publik Tidak Berpengaruh terhadap Hubungan antara Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap

Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu $-0,955 < 1,6690$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,343 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05, maka hasil penelitian ini menolak hipotesis kelima yang menyatakan interaksi kapasitas sumber daya manusia dan transparansi publik berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Artinya semakin tinggi transparansi publik terhadap kapasitas sumber daya manusia, maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS akan semakin menurun.

H₆ : Transparansi Publik Tidak Berpengaruh terhadap Hubungan antara Perencanaan Penganggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu $2,311 > 1,6690$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,024 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05, maka hasil penelitian ini menerima hipotesis keenam yang menyatakan interaksi perencanaan penganggaran dan transparansi publik berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Artinya semakin tinggi transparansi publik terhadap perencanaan penganggaran, maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS akan semakin meningkat.

H₇ : Transparansi Publik Tidak Berpengaruh terhadap Hubungan antara Politik Penganggaran terhadap

Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu $0,880 < 1,6690$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,383 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05, maka hasil penelitian ini menolak hipotesis kelima yang menyatakan interaksi politik penganggaran dan transparansi publik berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Artinya semakin tinggi transparansi publik terhadap politik penganggaran, maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS akan semakin menurun.

H₈ : Transparansi Publik Tidak Berpengaruh terhadap Hubungan antara Informasi Pendukung terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu $0,168 < 1,6690$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,867 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05, maka hasil penelitian ini menolak hipotesis kedelapan yang menyatakan interaksi informasi pendukung dan transparansi publik berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Artinya semakin tinggi transparansi publik terhadap informasi pendukung, maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS akan semakin menurun.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas sumber

daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran dan informasi pendukung dengan transparansi publik sebagai variabel moderating terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Sampel yang digunakan adalah SKPD yang berada di kabupaten Lingga. Hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Dimana pengaruh signifikan menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dengan KUA-PPAS, dan jika aparatur pemerintah profesional dan kompeten dalam menyusun KUA-PPAS, maka akan berdampak baik pula terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Dimana pengaruh signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi perencanaan penganggaran maka akan meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, karena apabila pada tahap awal

perencanaan baik maka akan berdampak baik pula pada perencanaan penganggaran selanjutnya.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Dimana pengaruh signifikan menunjukkan bahwa politik penganggaran mempunyai peran dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, yang mana peran legislatif yaitu anggota DPRD dalam penganggaran akan berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara informasi pendukung terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Dimana pengaruh signifikan menunjukkan bahwa informasi pendukung akan lebih meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS, dengan adanya informasi pendukung di lingkungan pemerintahan maka akan lebih meningkatkan terjadinya sinkronisasi antar dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menemukan bahwa transparansi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dengan sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dengan transparansi publik tidak

berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS. Dengan ini menjelaskan semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia, maka semakin menurun sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yang dimoderasi dengan transparansi publik.

6. Hasil pengujian hipotesis keenam menemukan bahwa transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara perencanaan penganggaran dengan sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran dengan transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS. Dengan ini menjelaskan semakin tinggi perencanaan penganggaran, maka semakin meningkat sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yang dimoderasi dengan transparansi publik.
7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menemukan bahwa transparansi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara politik penganggaran dengan sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa politik penganggaran dengan transparansi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS. Dengan ini menjelaskan semakin tinggi politik penganggaran, maka semakin menurun sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-

PPAS yang dimoderasi dengan transparansi publik.

8. Hasil pengujian hipotesis kedelapan menemukan bahwa transparansi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara informasi pendukung dengan sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi pendukung dengan transparansi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan KUA-PPAS. Dengan ini menjelaskan semakin tinggi informasi pendukung, maka semakin menurun sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yang dimoderasi dengan transparansi publik.

4.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, karena terdapat sejumlah keterbatasan yang peneliti temukan selama melakukan penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain :

1. Ruang lingkup Penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD kabupaten Lingga sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan kesemua objek secara keseluruhan.
2. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta kurangnya kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Masalah

subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

4.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian. Hal ini diperlukan untuk generalisasi hasil yang diperoleh.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambahkan variabel lain yang juga mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Sehingga semakin banyak variabel penelitian yang diteliti maka semakin banyak pengetahuan kita mengenai variabel-variabel yang terkait dengan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Wiwik. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* vol 5 No.1

Abdullah & Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX* 23-26 Agustus di Padang.

Arniati, Ely Katikaningdyah & Imelda, 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi pendukung Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen KUA-PPAS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII* 16-17 Oktober di Purwokerto.

Darlis, Edvan. 2001. Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran, *Simposium Nasional Akuntansi IV*. 30-31 Agustus. Bandung. 523-541

Halim, Abdul & Abdullah, Syukri. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*

Iskandar, Dudi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Penganggaran, Politik Penganggaran dengan Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderating Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Tesis Universitas Sumatra Utara

Baridwan, Zaki. 2000. Sistem Informasi Akuntansi

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/04/04/m1yd05-icw-penyusunan-apbd-kerap-tidak-transparan>.

[http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/01/06/lxdqwb-politik-peng-](http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/01/06/lxdqwb-politik-peng)

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Jogiyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman Pengalaman*, BPFE, Yogyakarta

- Handayani, Bestari Dwi, 2009. Pengaruh Revormasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD kota Semarang, *Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 1, NO.1*. Maret 2009
- Indriantoro, Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis, *Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Jogjakarta
- Irawan, Prasetya. 2000. Pengembangan Sumber Daya Manusi. STIE LAN Press. Jakarta
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mursyidi, 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Refika Aditama Bandung
- Musti, Musa Tarigan, 2002. Daerah semakin baik kelola APBD media keuangan daerah, Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Jakarta
- Sihabudin, Muammar. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan Penganggaran, dan Informasi Pendukung Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, *Jurnal Penelitian Universitas Muria Kudus*.
- Sopannah. 2010 Studi Fenomenologis: Menguak Prtisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD-JAAI Volume 14 No.1
- Sopannah dan Mardiasmo, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan
- Dewan Tentang Anggaran Dewan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.
- Rasyid, Abdul. 2009. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, *Jurnal Penelitian Universitas Yapis Papua*.
- Rahayu, Sri. 2010. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*.
- Tumbo, Sumelo. 2012. Permasalahan Aktual Dalam Evaluasi APBD dan Solusinya *Media Keuangan Daerah*, Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Jakarta
- Pemkab Lingga, 2012. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- _____. 2008 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- _____. 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____. 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

_____ . 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

_____ . 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012

_____ 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.